

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH

Tanah merupakan suatu bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar di Negara Agraris ini. Tidak dapat dipungkiri fenomena sengketa pertanahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sering terjadi. Beberapa faktor yang menjadi pengaruhnya antara lain seperti: tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan masih relatif rendah, tingginya kebutuhan manusia terhadap tanah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Praktek perwakafan di Negara Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan penerbitan sertifikat wakaf sebab sebagian besar obyek wakaf adalah berupa tanah, meskipun obyek wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja tetapi juga terhadap benda tidak bergerak, tentunya tidak dapat dihindari lagi kegiatan perwakafan tanah berhubungan erat dengan administrasi pertanahan.

Dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, di Kabupaten Rembang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Rembang?, Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Rembang dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Syarat tanah yang akan diwakafkan adalah tanah hak milik, Apabila tanah yang akan diwakafkan adalah berasal dari tanah adat maka harus diproses terlebih dahulu menjadi tanah milik. Hal ini untuk memudahkan proses pendaftaran tanah wakaf itu sendiri.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf para pihak yaitu Tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan baik pada tahap pembuatan akta ikrar wakaf maupun pengurusan pendaftaran tanah wakaf, Terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh wakif/nazhir mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf sebagai kurangnya sosialisasi tentang tata cara perwakafan tanah, Wakif dan nadzir beranggapan bahwa untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf memerlukan biaya yang mahal padahal untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya materai. Dalam hal ini terlihat kurangnya koordinasi dan transparansi yang baik untuk masalah biaya antar Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama.

Kata Kunci Pelaksanaan Pendaftaran, Tanah Wakaf,

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF "WAKAF" LAND REGISTRARION BASED ON THE ACT NO.41/2004 ABOUT THE "WAKAF" IN REMBANG DISTRICT

Land was a part of the fulfillment of basic human needs in this State Agriculture. It is inveteble phenomenon of land disputes in the lives of cammon people of Indonesia. Some of the factors that influence such as: the level of legal awareness of communitis in the area of land is still relatively low, the height of human needs on the ground in line with population growth and etc. The "wakaf" activities Indonesia is inseparable connection with the issuance of certificate "wakaf" because most object are in the from of land, although the objects of "wakaf" according to law no. 41/2004 is not limited in moving objects but also to the object that do not move, of cource, can not be avoided anymore the "wakaf" activites closely related to land administration.

The persistence of the "wakaf" land that has not been certified in the Rembang district. Based on the description above, then the problem can be presented in this thesis are: How does the implementation of "wakaf" land regristration based on the law no.41/2004 about the "wakaf" in Rembang district? What are the obstacles in the implementation of "wakaf" land regristration in the Rembang district and how overcome these obstacles? The method of approach which is used in this study is the juridical normative, and techniques of data collection by way of interviews with stakeholders and literature studies.

Based on the results of implementation reasech the "wakaf" land regristrasion in the Rembang district land office can be concluded as follows The requiriment of the land is must be owner. If the land is devired from the customary so the land is divered from the customary so the land must be processed property first. This is make easy in processing the "wakaf" land itself.

Obstacles in the implementation of the "wakaf" land regristration is not complete. Requirements needed both at the stage of making "wakaf" of pledge registration and maintance of "wakaf" land , limited knowledge possessed by wakif/nazhir on the procedure for regritration of "wakaf" land as a lack of socialitation of the procedures the "wakaf" activity, and nazhir "wakif thinks that to take care of "wakaf"land registration, but costly to take care of "wakaf" land registration is free of charge, except for the measurement of costs and stamp duty. In this case the the visible lack of coordination and transparency is good for the issue of costs between the land office and the Ministry of Religious Affairs.

The Keyword implementation Registration, The "wakaf" land,